

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Miftachul, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia* (Edisi Revisi). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ridwan HR. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Setiyono, Budi. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Semarang: Undip Press.
- Hartono, Sunaryati. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Alumni.
- Yusri, M., Syaiful Syafri, Ms., & Editor Parapat Gultom, M. (2021). *Kebijakan Dan Perencanaan Sosial Di Indonesia*. Medan: Umsu Press

Jurnal

- Deborah, V. C. (2020). *Urgensi Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Publik*. Universitas Kristen Satya Wacana. Skripsi.
- Elviandri, Khudzaifah Dimyati, Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2).
- Fitria, Sindi dan Tundjung Herning Sitabuana. (2021). Penerapan Konsep Welfare State dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama, Volume 4(2)*. Hal 64.
- Inter-Parliamentary Union and the United Nations (Office of the High Commissioner for Human Rights). (2016). *Human Rights Handbook for Parliamentarians* No 26. url: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf>. Diakses pada 10 Oktober 2022. Halaman 31
- Maulana, Aksa. (2017). *Implikasi Positivisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Skripsi.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2).
- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 428–453.
- Parikesit, Rio Admiral. (2021). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi

- Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18(4).
- Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “PASTI” Kemenkumham. *Jurnal HAM*, 10(1).
- Pratiwi, Cekli Setya *et al.* (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. JSSP. url: <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>. Diakses pada 15 Oktober 2022.
- Rofieq, Ainur. (2011). Pelayanan Publik Dan Welfare State. *Jurnal Governance*, 2(1).
- Rohanawati, Ayunita Nur. (2016). Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif. *Justitia et Pax*, Vol. 32 No. 1,
- Sibuea, H. P. (2002). Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: Erlangga sebagaimana dikutip Kembali oleh Soenarjanto, Bagus. (2019). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Widya Publika*. Volume 7(1).
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*. Volume 2(3).
- Utari, Dewi. (2017). Tanggung Jawab Perdata dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW. Tesis.
- V. Hadiyono. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1 No. 1,
- Warang, Florentinus Valeri. (2021). *Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 (2).
- Wijaya, Muhaji. (2018). *Kualitas Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Di Dispendukcapil Kabupaten Lumajang)*. University of Muhammadiyah Malang. Skripsi
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*. 1(1).

Internet

- Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Bidang HAM Kanwil Jateng Monitoring dan Evaluasi Pos Yankomas dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Rupbasan Kota Pekalongan*. url:

- <https://ham.go.id/2022/11/28/bidang-ham-kanwil-jateng-monitoring-dan-evaluasi-pos-yankomas-dan-pelayanan-publik-berbasis-ham-p2ham-di-rupbasan-kota-pekalongan/>. Diakses pada 22 Desember 2022
- Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Tingkatkan P2HAM di Jateng, Kanwil Jateng Lakukan Kunjungan ke Rutan Kelas IIB Demak*. url: <https://ham.go.id/2022/11/24/tingkatkan-p2ham-di-jateng-kanwil-jateng-lakukan-kunjungan-ke-rutan-kelas-iib-demak/>. Diakses pada 22 Desember 2022
- Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Kemenkumham Jateng Lakukan Persiapan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada Rupbasan Kelas I Semarang*. url: <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/6686-kemenkumham-jateng-lakukan-persiapan-pembinaan-lembaga-publik-berbasis-ham-p2ham-pada-rupbasan-kelas-i-semarang>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. (2019). *Sosialisasi P2HAM, Kanwil Kemenkumham Jabar Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis Ham Di Satker*. url: <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sosialisasi-p2ham-kanwil-kemenkumham-jabar-tingkatkan-pelayanan-publik-berbasis-ham-di-satker>. Diakses pada 1 Oktober 2022
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. *Tekankan Pentingnya Pelayanan Publik Berbasis HAM*. url: <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/8151-tekanan-pentingnya-pelayanan-publik-berbasis-ham>. Diakses pada 1 Oktober 2022
- Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. (2022). *Tingkatkan Kualitas Pelayanan Lapas Ambarawa terima kunjungan Kabid HAM Lista dan rombongan*. url: <https://lapasambarawa.kemenkumham.go.id/berita-utama/tingkatkan-kualitas-pelayanan-lapas-ambarawa-terima-kunjungan-kabid-ham-lista-dan-rombongan>. Diakses pada 22 Desember 2022
- Rupbasan Kelas II Cilacap. (2022). *Deklarasi Pencanangan P2HAM Kemenkumham Jateng, Rupbasan Cilacap Hadir Virtual* url: <https://rupbasancilacap.kemenkumham.go.id/berita-utama/deklarasi-pencanangan-p2ham-kemenkumham-jateng-rupbasan-cilacap-hadir-virtual> Diakses pada 25 Januari 2023
- Siahaan, Edward. (2023). *Pelayanan Publik Kita Masih Buruk. Ombudsman RI*. url: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-kita-masih-buruk>
- Sidauruk, Wanton. (2022). *Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022, Jumlah Instansi Masuk Zonasi Hijau Meningkat*. Ombudsman RI. url: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/--penganugerahan-predikat-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-2022--jumlah-instansi-masuk-zonasi-hijau-meningkat>
- Zakni, Muhammad Hafid. (2022). *Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Ombudsman Republik Indonesia. url: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-dalam-rangka-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>

Wawancara

Wawancara dengan Moh Hawary Dahlan selaku Kepala Subbidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, pada Rabu, 11 Januari 2023 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan dengan Bapak Moh. Hawary Dahlan S.H., M.H

1. Apa yang dilakukan Kanwil Jateng dalam program pelayanan publik berbasis HAM?
2. Apa yang dilakukan Bapak lakukan dalam program ini?
3. Program apa saja yang telah dilaksanakan Kanwil Jateng dalam memenuhi indicator-indikator pelayanan publik berbasis hak asasi manusia
4. Bagaimana relevansi antara program pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dengan AUPB?
5. Apakah dalam pelaksanaan program pelayanan publik berbasis HAM terdapat kendala?
6. Apa saran Bapak/Ibu untuk program pelayanan publik berbasis HAM?

Surat keterangan penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang – Jawa Tengah
Telepon : (024) 3543063, Faksimile : (024) 3546795
Laman : jateng.kemenkumham.go.id, Surel : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR: W.13.UM.01.01-43

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : BUDHIARSO WIDHYARSONO, S.H., M.H.
NIP : 196701181996031001
Jabatan : Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rafie Ardjawihatama
Nomor ID : 11000119130662
Keterangan : S1- Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

benar telah melaksanakan *penelitian* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada bulan Januari 2023 sesuai ketentuan yang berlaku dengan topik "*Pelayanan Publik Berbasis HAM*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 6 Februari 2023
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
u.b. Kepala Bagian Umum,


Budhiarso Widhyarsono
NIP 196701181996031001